

OUTCOME

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN
AKUNTABEL

	CSF OUTCOME	KONDISI YANG DIPERLUKAN
1	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
2	Belum optimalnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Perangkat Daerah
3	Belum efektifnya pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan dan Pengawasan Pemerintahan
4	Belum komprehensifnya sinergitas perencanaan dan pembangunan dengan Perangkat Daerah	Meningkatkan Komprehensif Sinergitas Perencanaan dan Pembangunan dengan Perangkat Daerah

No	Rujukan Tahapan	Kinerja	Indikator Kinerja	Keterangan
	Tahap 1	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL	Nilai Lima Area Reformasi Birokrasi	kinerja strategis
	Tahap 2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	(1) Nilai pelaporan SAKIP (2) Persentase SKPD dengan capaian IKK tinggi	kinerja strategis
	Tahap 3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	(1) Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana. (2) Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana (3) Rata-rata capaian kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi	kinerja taktikal intermediate
	Tahap 3	Optimalisasi kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	(1) Persentase kebijakan bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana. (2) Persentase kebijakan bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	kinerja taktikal immediate
	Tahap 3	Tersedianya data pengelolaan administrasi pemerintahan daerah	Jumlah data pengelolaan administrasi pemerintahan yang tersedia	kinerja operasional
	Tahap 3	Tersedianya data pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah data pengelolaan administrasi kewilayahan yang tersedia	kinerja operasional
	Tahap 3	Tersedianya data fasilitasi otonomi daerah	Jumlah data fasilitasi otonomi daerah yang tersedia	kinerja operasional
	Tahap 3	Tersedianya data pengelolaan pembinaan mental spiritual	Jumlah data pengelolaan pembinaan mental spiritual yang tersedia	kinerja operasional
	Tahap 3	Tersedianya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial	Jumlah layanan administrasi kesejahteraan sosial yang dilakukan	kinerja operasional
	Tahap 3	Tersedianya monitoring, evaluasi dan capaian kinerja terkait kebijakan kesejahteraan masyarakat	Jumlah kebijakan dan kinerja kesejahteraan masyarakat yang dimonev	kinerja operasional
	Tahap 3	Terlaksananya penyaluran bantuan hibah bidang keagamaan sesuai prosedur	Jumlah bantuan hibah yang disalurkan	kinerja operasional
	Tahap 3	Optimalisasi kebijakan layanan produk hukum	Indeks Kualitas Kebijakan	kinerja taktikal immediate
	Tahap 3	Tersedianya produk hukum daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum yang diterbitkan sesuai aturan	kinerja operasional
	Tahap 3	Terlaksananya mediasi dan layanan bantuan hukum	Jumlah objek perkara pelayanan bantuan hukum yang ditangani dan terselesaikan	kinerja operasional
	Tahap 3	Terseleenggaranya dokumentasi dan penyeberluasan produk hukum	Jumlah produk hukum yang terdokumentasi dan disebarluaskan secara online	kinerja operasional
	Tahap 3	Optimalisasi kebijakan perekonomian dan pembangunan	(1) Persentase kebijakan bidang pembinaan BUMD, BLUD, perekonomian dan SDA yang terlaksana (2) Persentase kebijakan bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi pembangunan yang terlaksana	kinerja taktikal immediate
	Tahap 3	Terlaksananya monev kinerja pengelolaan BLUD dan BUMD	Jumlah kebijakan pengelolaan BLUD dan BUMD yang dimonev	kinerja operasional
	Tahap 3	Tersedianya data perkembangan distribusi perekonomian	Jumlah data perkembangan distribusi perekonomian yang tersedia	kinerja operasional
	Tahap 3	Tersedianya data perencanaan dan pengawasan ekonomi	Jumlah data perencanaan dan pengawasan ekonomi yang tersedia	kinerja operasional
	Tahap 3	Tersedianya data implementasi kebijakan perekonomian	Jumlah data implementasi kebijakan perekonomian yang tersedia	kinerja operasional
	Tahap 3	Tersedianya data evaluasi program pembangunan	Jumlah data evaluasi program pembangunan yang tersedia	kinerja operasional
	Tahap 3	Tersedianya data evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	Jumlah data evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tersedia	kinerja operasional
	Tahap 3	Tersedianya database informasi administrasi pembangunan	Jumlah database informasi administrasi pembangunan yang tersedia	kinerja operasional
	Tahap 3	Optimalisasi kebijakan pengadaan barang dan jasa	Indeks tata kelola PBJ	kinerja taktikal immediate
	Tahap 3	Terlaksananya pelayanan pengadaan barang jasa secara elektronik	Jumlah pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	kinerja operasional
	Tahap 3	Tersedianya data pengelolaan PBJ	Jumlah data pengelolaan barang dan jasa yang tersedia	kinerja operasional
	Tahap 3	Terlaksananya pembinaan PBJ	Jumlah ASN PBJ pada SKPD yang dibimbing dan dilatih	kinerja operasional
	Tahap 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Perangkat Daerah	(1) Nilai IKM SETDA (2) Nilai Budaya Kerja SETDA (3) Nilai SAKIP SETDA	Kinerja strategis
	Tahap 3	Meningkatnya Efektivitas Layanan Administrasi Umum dan Tata Kelola Perangkat Daerah	(1) Persentase realisasi kebijakan bidang pengadministrasi umum yang terlaksana (2) Rata-Rata capaian kinerja SKPD dan unit kerja garis koordinasi	kinerja taktikal intermediate
	Tahap 3	Optimalisasi kebijakan layanan administratif perkantoran	Persentase kebijakan layanan administrasi perkantoran yang terlaksana	kinerja taktikal immediate
	Tahap 3	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	(1) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (2) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	kinerja operasional
	Tahap 3	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan internal	(1) Jumlah dokumen perencanaan SETDA yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan (2) Jumlah dokumen pelaporan kinerja SETDA yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	kinerja operasional
	Tahap 3	Tersedianya data barang milik daerah	(1) Jumlah BMD yang tersedia (2) Jumlah BMD yang terpelihara	kinerja operasional
	Tahap 3	Terseleenggaranya administrasi keuangan	(1) Jumlah dokumen akuntabilitas keuangan yang disusun tepat waktu (2) Jumlah cashflow atau aliran kas yang disusun	kinerja operasional

Tahap 3	Terselenggaranya kegiatan kerumahtanggaan sekretariat	Jumlah fasilitasi layanan kerumahtanggaan pimpinan	kinerja operasional
Tahap 3	Optimalisasi kebijakan layanan kehumasan dan keprotokol	Persentase kebijakan bidang keprotokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana	kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Tersedianya sistem informasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah yang bisa diakses masyarakat	Jumlah informasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah yang tersedia secara online	kinerja operasional
Tahap 3	Tersedianya fasilitasi kegiatan pimpinan dengan masyarakat	Jumlah kegiatan pimpinan yang difasilitasi	kinerja operasional
Tahap 3	Tersedianya data pelaporan keprotokol	Jumlah laporan keprotokol	kinerja operasional
Tahap 3	Optimalisasi kebijakan penataan organisasi	(1) Nilai Komposit kelembagaan (2) Nilai IKM Bagian dan UPP yang bernilai Baik (3) Nilai RB area akuntabilitas	kinerja taktikal
Tahap 3	Tersedianya dokumen penataan kelembagaan, analisis jabatan dan analisis beban kerja	Jumlah Perda, Perbup Kelembagaan, Anjab dan ABK	kinerja operasional
Tahap 3	Tersedianya koordinasi dan fasilitasi pelayanan publik	(1) Jumlah Bagian yang nilai SKM nya baik (2) Jumlah SKPD UPP yang nilai IPP nya baik	kinerja operasional
Tahap 3	Tersedianya dokumen monev ketatalaksanaan	Jumlah SKPD yang memiliki SOP dan proses bisnis sesuai aturan	kinerja operasional
Tahap 3	Tersedianya dokumen pelaporan SAKIP dan Reformasi Birokrasi	(1) Jumlah SKPD yang nilai SAKIP nya Baik (2) Jumlah LKIP Kabupaten yang disusun dan disampaikan tepat waktu	kinerja operasional
Tahap 3	Optimalisasi kebijakan layanan kepegawaian internal	Persentase kebijakan bidang tata usaha, staf ahli dan kepegawaian yang terlaksana	kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kinerja ASN internal	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek peningkatan kinerja internal	kinerja operasional
Tahap 3	Terlaksananya monitoring kinerja aparatur	Jumlah ASN yang dimonitoring kinerjanya	kinerja operasional
Tahap 2	Crosscutting dengan Inspektorat		
Tahap 2	Crosscutting dengan Bappedalitbang dan BPKPAD		

Crosscuttin

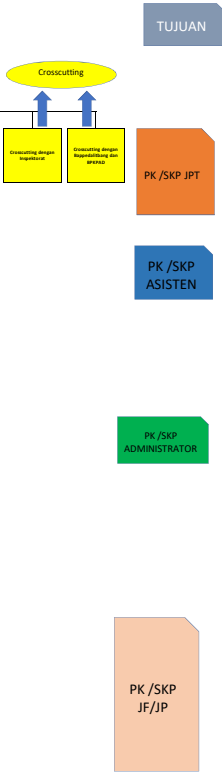
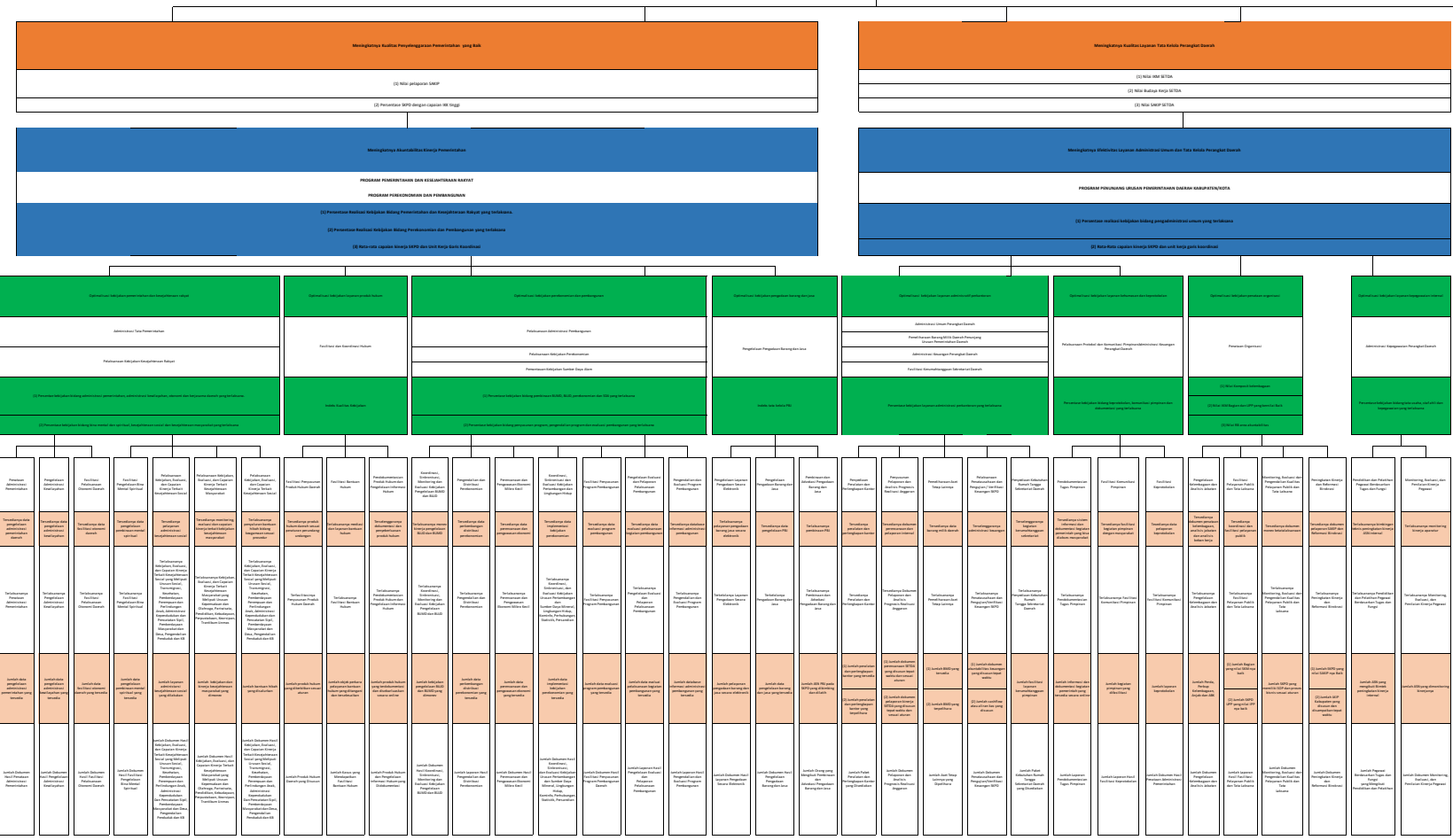
	Rujukan Tahapan	Kinerja	Indikator Kinerja	Keterangan		
	Tahap 1	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL	Nilai Lima Area Reformasi Birokrasi	kinerja strategis	TUJUAN	
	Tahap 2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	(1) Nilai pelaporan SAKIP (2) Persentase SKPD dengan capaian IKK tinggi	kinerja strategis	SASARAN STRATEGIS	PK SEKDA
	Tahap 3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	(1) Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana. (2) Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang (3) Rata-rata capaian kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi	kinerja taktikal intermediate	SASARAN PROGRAM	PK ASISSTEN 1 DAN ASISSTEN 2
	Tahap 3	Optimalisasi kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	(1) Persentase kebijakan bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana. (2) Persentase kebijakan bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	kinerja taktikal immediate	SASARAN KEGIATAN	PK KABAG
	Tahap 3	Tersedianya data pengelolaan administrasi pemerintahan daerah	Jumlah data pengelolaan administrasi pemerintahan yang tersedia	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF
	Tahap 3	Tersedianya data pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah data pengelolaan administrasi kewilayahan yang tersedia	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF
	Tahap 3	Tersedianya data fasilitasi otonomi daerah	Jumlah data fasilitasi otonomi daerah yang tersedia	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF
	Tahap 3	Tersedianya data pengelolaan pembinaan mental spiritual	Jumlah data pengelolaan pembinaan mental spiritual yang tersedia	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF
	Tahap 3	Tersedianya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial	Jumlah layanan administrasi kesejahteraan sosial yang dilakukan	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF
	Tahap 3	Tersedianya monitoring, evaluasi dan capaian kinerja terkait kebijakan kesejahteraan masyarakat	Jumlah kebijakan dan kinerja kesejahteraan masyarakat yang dimonev	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF
	Tahap 3	Terlaksananya penyaluran bantuan hibah bidang keagamaan sesuai prosedur	Jumlah bantuan hibah yang disalurkan	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF
	Tahap 3	Optimalisasi kebijakan layanan produk hukum	Indeks Kualitas Kebijakan	kinerja taktikal immediate	SASARAN KEGIATAN	PK KABAG
	Tahap 3	Tersedianya produk hukum daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum yang diterbitkan sesuai aturan	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF
	Tahap 3	Terlaksananya mediasi dan layanan bantuan hukum	Jumlah objek perkara pelayanan bantuan hukum yang ditangani dan terselesaikan	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF
	Tahap 3	Terseleenggaranya dokumentasi dan penyeberluasan produk hukum	Jumlah produk hukum yang terdokumentasi dan disebarluaskan secara online	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF
	Tahap 3	Optimalisasi kebijakan perekonomian dan pembangunan	(1) Persentase kebijakan bidang pembinaan BUMD, BLUD, perekonomian dan SDA yang terlaksana (2) Persentase kebijakan bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi pembangunan yang terlaksana	kinerja taktikal immediate	SASARAN KEGIATAN	PK KABAG
	Tahap 3	Terlaksananya monev kinerja pengelolaan BLUD dan BUMD	Jumlah kebijakan pengelolaan BLUD dan BUMD yang dimonev	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF
	Tahap 3	Tersedianya data perkembangan distribusi perekonomian	Jumlah data perkembangan distribusi perekonomian yang tersedia	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF
	Tahap 3	Tersedianya data perencanaan dan pengawasan ekonomi	Jumlah data perencanaan dan pengawasan ekonomi yang tersedia	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF
	Tahap 3	Tersedianya data implementasi kebijakan perekonomian	Jumlah data implementasi kebijakan perekonomian yang tersedia	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF
	Tahap 3	Tersedianya data evaluasi program pembangunan	Jumlah data evaluasi program pembangunan yang tersedia	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF
	Tahap 3	Tersedianya data evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	Jumlah data evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tersedia	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF
	Tahap 3	Tersedianya database informasi administrasi pembangunan	Jumlah database informasi administrasi pembangunan yang tersedia	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF
	Tahap 3	Optimalisasi kebijakan pengadaan barang dan jasa	Indeks tata kelola PBJ	kinerja taktikal immediate	SASARAN KEGIATAN	PK KABAG
	Tahap 3	Terlaksananya pelayanan pengadaan barang jasa secara elektronik	Jumlah pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF
	Tahap 3	Tersedianya data pengelolaan PBJ	Jumlah data pengelolaan barang dan jasa yang tersedia	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF
	Tahap 3	Terlaksananya pembinaan PBJ	Jumlah ASN PBJ pada SKPD yang dibimbing dan dilatih	kinerja operasional	SASARAN KEGIATAN	PK JF

Tahap 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Perangkat Daerah	(1) Nilai IKM SETDA (2) Nilai Budaya Kerja SETDA (3) Nilai SAKIP SETDA	kinerja strategis	SASARAN STRATEGIS	PK SEKDA
Tahap 3	Meningkatnya Efektivitas Layanan Administrasi Umum dan Tata Kelola Perangkat Daerah	(1) Persentase realisasi kebijakan bidang pengadministrasi umum yang terlaksana (2) Rata-Rata capaian kinerja SKPD dan unit kerja garis koordinasi	kinerja taktikal intermediate	SASARAN PROGRAM	PK ASISTEN 3
Tahap 3	Optimalisasi kebijakan layanan administratif perkantoran	Persentase kebijakan layanan administrasi perkantoran yang terlaksana	kinerja taktikal immediate	SASARAN KEGIATAN	PK KABAG
Tahap 3	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	(1) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (2) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	kinerja operasional	SASARAN SUB KEGIATAN	PK JF
Tahap 3	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan internal	(1) Jumlah dokumen perencanaan SETDA yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan (2) Jumlah dokumen pelaporan kinerja SETDA yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	kinerja operasional	SASARAN SUB KEGIATAN	PK JF
Tahap 3	Tersedianya data barang milik daerah	(1) Jumlah BMD yang tersedia (2) Jumlah BMD yang terpelihara	kinerja	SASARAN SUB	PK JF
Tahap 3	Terselenggaranya administrasi keuangan	(1) Jumlah dokumen akuntabilitas keuangan yang disusun tepat waktu (2) Jumlah cashflow atau aliran kas yang disusun	kinerja operasional	SASARAN SUB KEGIATAN	PK JF
Tahap 3	Terselenggaranya kegiatan kerumahtanggaan sekretariat	Jumlah fasilitasi layanan kerumahtanggaan pimpinan	kinerja operasional	SASARAN SUB KEGIATAN	PK JF
Tahap 3	Optimalisasi kebijakan layanan kehumasan dan keprotokolan	Persentase kebijakan bidang keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana	kinerja taktikal immediate	SASARAN KEGIATAN	PK KABAG
Tahap 3	Tersedianya sistem informasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah yang bisa diakses masyarakat	Jumlah informasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah yang tersedia secara online	kinerja operasional	SASARAN SUB KEGIATAN	PK JF
Tahap 3	Tersedianya fasilitasi kegiatan pimpinan dengan masyarakat	Jumlah kegiatan pimpinan yang difasilitasi	kinerja operasional	SASARAN SUB KEGIATAN	PK JF
Tahap 3	Tersedianya data pelaporan keprotokolan	Jumlah laporan keprotokolan	kinerja	SASARAN SUB	PK JF
Tahap 3	Optimalisasi kebijakan penataan organisasi	(1) Nilai Komposit kelembagaan (2) Nilai IKM Bagian dan UPP yang bernilai Baik (3) Nilai RB area akuntabilitas	kinerja taktikal immediate	SASARAN KEGIATAN	PK KABAG
Tahap 3	Tersedianya dokumen penataan kelembagaan, analisis jabatan dan analisis beban kerja	Jumlah Perda, Perbup Kelembagaan, Anjab dan ABK	kinerja operasional	SASARAN SUB KEGIATAN	PK JF
Tahap 3	Tersedianya koordinasi dan fasilitasi pelayanan publik	(1) Jumlah Bagian yang nilai SKM nya baik (2) Jumlah SKPD UPP yang nilai IPP nya baik	kinerja operasional	SASARAN SUB KEGIATAN	PK JF
Tahap 3	Tersedianya dokumen monev ketatalaksanaan	Jumlah SKPD yang memiliki SOP dan proses bisnis sesuai aturan	kinerja operasional	SASARAN SUB KEGIATAN	PK JF
Tahap 3	Tersedianya dokumen pelaporan SAKIP dan Reformasi Birokrasi	(1) Jumlah SKPD yang nilai SAKIP nya Baik (2) Jumlah LKIP Kabupaten yang disusun dan disampaikan tepat waktu			
Tahap 3	Optimalisasi kebijakan layanan kepegawaian internal	Persentase kebijakan bidang tata usaha, staf ahli dan kepegawaian yang terlaksana	kinerja taktikal immediate	SASARAN KEGIATAN	PK KABAG
Tahap 3	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kinerja ASN internal	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek peningkatan kinerja internal	kinerja operasional	SASARAN SUB KEGIATAN	PK JF
Tahap 3	Terlaksananya monitoring kinerja aparatur	Jumlah ASN yang dimonitoring kerjanya	kinerja operasional	SASARAN SUB KEGIATAN	PK JF
	Crosscutting dengan Inspektorat				
	Crosscutting dengan Bappedalitbang dan BPKPAD				

CASCADING SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN



TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL
 Nilai Lima Area Reformasi Birokrasi



Crosscutting

Crosscutting dengan aspek...

Crosscutting dengan aspek...

TUJUAN

PK /SKP JPT

PK /SKP ASISTEN

PK /SKP ADMINISTRATOR

PK /SKP JF/IP

KINERJA STAF AHLI

TUGAS POKOK	:	MEMBERIKAN SARAN ATAS PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SESUAI BIDANG TUGAS KEPADA KEPALA DAERAH
OUTCOME	:	MENINGKATNYA KUALITAS RUMUSAN KEBIJAKAN
INDIKATOR OUTCOME	:	PERSENTASE KEBIJAKAN YANG TELAH DIEVALUASI, DIRUMUSKAN SESUAI BIDANG TUGAS
PK STAF AHLI	:	ADALAH OUTCOME STAF AHLI
		MENINGKATNYA KUALITAS RUMUSAN KEBIJAKAN